

Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh

Aminah, Sri Mulyani, Ubaidullah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala

Email:

aminah@unsyiah.ac.id

Abstract

Since the reform era, women in Indonesia have begun to be reconsidered in various aspects, including being a part of policymakers and political contestation. It can be seen from implementing affirmative action policies, which obliges every political party to include the national level management and legislative candidates for at least 30% women. The recruitment process for legislative candidates interesting to discuss because the candidates not only from party cadres but including non-cadres. Especially women candidates that sometimes had no basis and experiences in politics also recruited. This study aims to determine the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) recruitment patterns in determining women's candidates for the 2019 general election in Banda Aceh City. The research method used is descriptive qualitative. This study concluded that PKS uses a candidate's recruitment pattern with an open and closed system with the Barber model and always pays attention to each candidate's motivation sources and opportunities.

Keywords: *PKS, Recruitment Patterns, Women Candidate*

Abstrak

Sejak era reformasi, perempuan di Indonesia mulai dipertimbangkan kembali dalam berbagai aspek, termasuk menjadi pembuat kebijakan dan kontestasi politik. Hal ini terlihat dari penerapan kebijakan *affirmative action* yang mewajibkan setiap parpol untuk mengikutsertakan pengurus tingkat nasional dan calon legislatif minimal 30% perempuan. Proses rekrutmen calon legislatif menarik untuk dibahas karena calon tidak hanya dari kader partai tapi termasuk non kader. Apalagi calon perempuan yang terkadang tidak punya dasar dan pengalaman di bidang politik pun ikut direkrut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) dalam penentuan calon perempuan pada pemilihan umum 2019 di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS menggunakan pola rekrutmen calon dengan sistem terbuka dan tertutup model Barber dan selalu memperhatikan sumber motivasi dan peluang masing-masing calon.

Kata kunci: *PKS, Pola Rekrutmen, Calon Perempuan*

* * *

A. Pendahuluan

Era reformasi sering disebut sebagai era kebangkitan perempuan Indonesia. Setidaknya hal ini diindikasikan dengan sejumlah paket kebijakan publik yang pro terhadap perempuan. Mulai dari undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, *trafficking*, hingga dengan undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu). Keterlibatan perempuan di ranah politik semakin mendapat momentum ketika pemerintah menerapkan kebijakan *affirmative action* melalui sejumlah regulasi seperti undang-undang tentang pemilu yang mewajibkan setiap partai politik untuk menyertakan kepengurusan tingkat nasional dan pencalonan legislatif sekurang-kurangnya 30% kuota khusus bagi perempuan. Kebijakan kuota ini sesungguhnya telah di gulirkan sejak pemilu 2004, tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan (Affiah, 2017; Endah, 2010; Bisri, 2014).

Perempuan, meski jumlahnya separuh lebih besar, tidak pernah dilibatkan dalam membuat keputusan, Perempuan hanya melaksanakan dan mengikuti setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Akibatnya perempuan tetap di ranah domestik. Oleh karenanya, perlu mengubah paradigma "*politik bukan sekedar kekuasaan yang diwakilkan*

tetapi harus mengajak semua orang bicara. Perempuan harus hadir sendiri, bicara sendiri, tidak diwakili oleh laki-laki” (Armiwulan, 2005; Puspitawati, 2012) Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pemilihan umum (pemilu) yang dibuat oleh parpol di parlemen justru membuat mereka tertekan. Ada berbagai tekanan pihak luar, Parpol memang harus ditekan agar tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Ia cenderung mengambil hal yang menguntungkan sekalipun tidak ada sanksi jika tidak memenuhi kuota, minimal sudah ada perdebatan keterwakilan perempuan diinternal partai. Parpol merasa tidak enak tidak punya wakil perempuan (Priyatmoko, 1992; Ratna, 1999; Soetomo, 2007).

Di Provinsi Aceh sendiri terdapat berbagai bentuk fenomena bahkan terjadi pro kontra terhadap pelaksanaan pemenuhan kuota 30% dalam merekrut kader menjelang pemilu 2019. Adapun jumlah caleg dan pemenang pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel jumlah caleg dan pemenang pemilu 2019 Kota Banda Aceh

No	Nama Partai	Jumlah Caleg		Jumlah Pemenang Pemilu	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1.	PKB	3	4	-	-
2.	Gerindra	17	12	4	-
3.	PDIP	8	7	-	-
4.	Golkar	18	12	2	1
5.	Nasdem	18	12	3	-
6.	Berkarya	12	8	-	-
7.	PKS	18	12	3	2
8.	Perindo	6	9	-	-
9.	PPP	18	12	1	1
10.	PAN	18	12	5	-
11.	Hanura	16	13	-	-
12.	Demokrat	18	12	5	-
13.	PA	21	13	2	-

14	SIRA	6	4	-	-
15.	PD Aceh	20	11	-	-
16.	PNA	22	14	1	-
17.	PBB	15	11	-	-
18.	PKP Indonesia	5	3	-	-

Sumber: Dialeksis.com

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan banyaknya partai yang mengusung calon PKS lebih terlihat unggul dengan mendapatkan 2 kursi untuk perempuan. Selain itu, adanya bakal caleg perempuan yang direkrut oleh partai untuk pemenuhan kuota perdapil (Daerah Pemilihan Tetap) juga pernah terjadi. Konsep ideal rekrutmen politik digambarkan sebagai kegiatan merekrut anggota-anggota dari masyarakat dan dari subkultur khusus komunitas keagamaan, status, kelas, komunitas etnik, dan yang serupa dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik (Soetomo, 2007).

Rekrutmen politik pada hakikatnya bisa diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik maupun dalam sistem politik suatu Negara. fungsi rekrutmen tersebut dalam penerapannya partai akan menyesuaikan dengan mekanisme masing-masing partai. Selain itu rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi juga kekuasaan lainnya. Dalam kaitannya dengan partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat vital. Hal tersebut dikarenakan jika gagalnya fungsi rekrutmen maka akan mengancam keberlangsungan partai politik. oleh karenanya partai politik

memerlukan penyegaran keanggotaan agar bisa bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di pandangan masyarakat.

Terdapat rekrutmen politik model Barber yang Menurutnya ada tiga dimensi (variabel utama) rekrutmen yaitu motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan akhirnya, kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan (Soetomo, 2007:23).

Browning (1996) memperkuat model barber, yang menurutnya perilaku perekrutan ditentukan oleh sindrom motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku politikus ditentukan oleh motivasi dominannya.

Dalam kajian ini penulis mengambil Objek penelitian yaitu berfokus pada PKS di Kota Banda Aceh. Peneliti merasa tertarik melihat keberhasilan dari PKS yang pada masa pemilu legislatif 2019 lalu di kota Banda Aceh, memperoleh 5 kursi yang dua diantaranya diisi oleh perempuan yaitu Tati Meutia Asmara dan Devi Yunita.

Dari jumlah keseluruhan dari daftar calon tetap anggota DPRK 2019 terdapat sekitar 422 orang, diantaranya laki-laki 111 orang dan perempuan 71 orang, dan dari partai PKS sendiri terdapat laki-laki 18

orang dan perempuan 12 orang dengan keseluruhan 30 orang. Jumlah tersebut dilihat dari calon yang mendaftar perdapil yaitu pada Dapil 1 Baiturrahman dan Ulee Kareng sebanyak 84 orang, Dapil 2 Kuta Alam 98 orang, Dapil 3 Syiah Kuala dan Ulee Kareng 100, Dapil 4 Banda Raya dan Jaya Baru 84 orang, Dapil 5 Kuta Raja dan Meuraxa 56 orang (KIP Kota Banda Aceh, 2019)

Tidak terlepas dari halnya PKS, yang mana ketika saat proses perekrutan bakal caleg perempuan tidak sepenuhnya caleg yang direkrut diwajibkan dari kader partai itu sendiri. Bahkan juga diperbolehkan caleg yang bukan kader untuk dijadikan bacaleg dari partai, dan tidak menutup kemungkinan bahwa caleg yang non kader lebih unggul dibandingkan dengan caleg dari kader itu sendiri. Kondisi tersebut melahirkan berbagai pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih mendalam terkait dengan pola perekrutan bakal calon legislator perempuan di kedua partai tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola Rekrutmen bacaleg Perempuan PKS jelang pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yang ditinjau berdasarkan teori rekrutmen politik model Barber?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif (Raco, 2006; Silalahi, 2012; Moleong, 2012). Adapun yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu Pola rekrutmen bacaleg yang dilakukan oleh PKS menjelang pemilu legislatif 2019 di Kota Banda Aceh. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ketua DPD PKS, Wakil Ketua

Umum Dewan pengurus Daerah-1, Anggota Bacaleg perempuan PKS, Direktur Eksekutif KATA HATI sekaligus sebagai Pemerhati Perempuan, dan dari pihak Akademisi. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga kegiatan yaitu Reduksi data, Penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

Pemilihan umum merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputi undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Anggara, 2013: 4).

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Perekrutan dalam partai politik relevan dengan halnya penyeleksian terhadap calon anggota yang akan ditempatkan dalam jabatan politik yang penerapannya akan sesuai dengan mekanisme masing-masing partai. Partai politik yang melakukan rekrutmen politik untuk mengisi

jabatan politik harus melakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART masing-masing partai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua umum DPD PKS yaitu Iwan Sulaiman yang mengatakan bahwa:

"Kita pertama diamanahkan untuk membentuk tim seleksi. Bidang khusus yang terlibat ialah bidang kewanitaan. Tidak semua bidang terlibat misalkan bidang kepemudaan, humas dan sebagainya itu tidak terlibat langsung. Pada penyeleksian yang diutamakan ini ialah bidang kewanitaan dikarenakan dibidang ini ada yang memberikan masukan khusus. Sedangkan PKS jika tidak ingin pun merekrut dari luar itu bisa, karena PKS kan sistemnya pengaderan sesuai undang-undang partai politik, bahwa kita partai politik harus membuat sistem perekrutan keanggotaan. Jangan nanti menjelang pemilu ambil dimana ada perempuan-perempuan untuk dijadikan caleg, kita tidak menginginkan itu. Di PKS pengaderan betul-betul berjalan itu dalam artian rekrutmen awal disitulah dia bahwa caleg-caleg yang kita saring itu dari pengaderan partai politik, dia ikut training, dia ikut pembinaan, dia ikut pelatihan bahkan bisa mingguan, dua mingguan paling kurang bulannya itu kader harus mendapatkan materi-materi tentang kepartaian. Kemudian untuk perekrutan kemarin kita juga membuka jalur luar karena ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan yang mungkin baru tahu bahwa PKS itu dan visi misinya begini nah itu kita buka juga peluang dan kita liat juga track recordnya sebagai caleg dan kita samakan dengan caleg dari kader, karena sistem pemilu kita kan terbuka gak ada istilah kalau dia kader dia nanti yang terpilih, itu nanti masyarakat yang akan memilih ketika kita sudah masukkan di dalam daftar caleg" (Iwan Sulaiman, Wawancara, 21 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari ketua di atas dapat disimpulkan perekrutan bakal caleg perempuan dari PKS sama halnya terkait dengan konsep rekrutmen Politik Model Rush dan Althof dimana partai politik telah mempunyai kriteria tersendiri dari keterampilan para calon yang mereka anggap layak yang kriteria itu sendiri nantinya

akan menjadi representatif akan tuntutan dan harapan masyarakat, dan hal itu juga akan membuat sistem kontrol yang akan semakin kuat dan kompetitif.

Adapun pola rekrutmen yang dilakukan PKS secara umum adalah rekrutmen terbuka. Hal ini berkaitan dengan dibukanya peluang seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk berkesempatan menjadi caleg dari PKS. Selain itu, partai juga menerapkan sistem rekrutmen tertutup dengan menggunakan *stelsel pasif*. Yang mana seseorang yang ditunjuk untuk menjadi bakal caleg ialah kader partai yang sudah dipertimbangkan loyalitas dan kemampuannya terhadap partai PKS dengan ketentuan mereka tetap melalui tahap seleksi yang sama dengan bakal caleg dari tokoh masyarakat, sehingga semua tetap diperlakukan sama, sesuai dengan landasan partai politik yang memberikan wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia untuk mencapai nilai-nilai dan tujuan yang sama untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan wakil ketua Badan Legislasi DPR Aceh periode 2019-2024 yang juga salah satu dari keanggotaan PKS yaitu Bardan Sahidi mengungkapkan bahwa:

“Untuk menjadi caleg itu pintu masuknya ada tiga, untuk tokoh perempuan rekrutmen pertama yaitu jalur kader, yang kedua dari jalur tokoh masyarakat atau publik figur dan yang ketiga ini yang menarik ada yang kemudian datang sendiri. itu kita lihat motivasinya apa dan ada juga pensiunan yang ingin mencalonkan diri datang ke partai setelah dia masuk baru dia dibekali terkait dengan AD/ART yang kami sebut itu KHITOH (garis perjuangan partai) itu dia pola rekrutmennya. Tapi ada juga yang bergabung dengan partai di parlemen itu tidak berorientasi kepada caleg, jadi dia hanya ikut kegiatan-kegiatan sosial, ikut kegiatan pengajian kemudian advokasi.

Dia ingin dibela, dibantu, banyak kegiatan beliau yang ingin dibantu dan lain sebagainya katakanlah kelompok-kelompok perempuan, marginal, dan ada juga yang sering masuk atau datang ke partai itu proposal. Yaitu proposal untuk kegiatan apa yang bisa dibantu dari partai. Hal yang wajib dalam seseorang yang ingin menjadi caleg dia harus mengikuti program pembinaan partai namanya yaitu TOP (training orientasi partai)" (Bardan Sahidi, Wawancara, 22 September 2020).

Secara teknis pola rekrutmen yang telah dilakukan partai sangatlah baik, walaupun belum terlalu masif dikarenakan partai masih memberikan peluang terhadap masyarakat non-kader agar bisa melakukan pendaftaran secara manual. Bagi tokoh masyarakat yang ingin bergabung dan mengajukan diri tidak dipermasalahkan oleh partai selagi dia memiliki loyalitas dan kemampuan.

Keunikan yang lain di PKS ada beberapa yang menawarkan diri ke PKS tidak secara terang-terangan karena disistem PKS mengingatkan bahwa jangan menjadi nafsu ketika menjadi caleg, tetapi jadikanlah ini sebagai kepercayaan. Dan bisa juga melalui perantaranya yaitu orang-orang yang dekat dan paham dengan partai PKS sehingga rata-rata setelah partai mendapatkan informasi yang seperti itu, partai sendiri yang akan menjumpai si calon, silaturahmi dan mengobrol masalah PKS karena jarang sekali yang datang secara terang-terangan. Rata-rata tokoh perempuan itu memang ada caranya tersendiri. Bahkan ada tokoh perempuan yang didatangi partai dia mendukung tapi memohon maaf karena dia tidak dapat bergabung dengan partai, dia hanya membantu dari luar, dan ada juga beberapa tokoh yang ketika dia bergabung di dalam partai politik dia takut tidak diterima oleh orang lain walaupun telah dijelaskan dengan baik-baik

oleh partai. Dan memang ada persepsi dari masyarakat ketika telah bergabung dengan partai sudah tidak independen lagi, jika terjun kemasyarakatan sudah tidak seimbang lagi dan partai tidak menyalahkan hal tersebut karena itu kejadian di dalam masyarakat.

Hal tersebut membuat penulis merasa bahwa PKS menjadi salah satu partai yang memiliki *basic* terbaik dalam proses perekrutan, baik itu kader perempuan dan laki-laki maupun dalam proses perekrutan Bacaleg dari kader sendiri maupun non-kader. Hal tersebut juga hampir selaras dengan tuturan dari salah satu Bacaleg dari PKS pada periode 2019 Yesi Budaya Sari yang mengatakan bahwa:

“Saya memang kader dari PKS sejak 2007, silaturahmi kami salah satunya dari majelis taklim, dan disitu pertama berkumpul perempuan yang dari kader dan non-kader sendiri sehingga siapapun boleh untuk mengikuti kajian dan ada beberapa teman yang bergabung dengan PKS dari majelis tersebut. Yang boleh menjadi kader syaratnya yaitu non-PNS dan melihat latar belakangnya. Kalau mau mencari suara indikator yang dilihat yaitu basis massa kemudian keuangan karena dari partai tidak bisa mensupport semuanya, PKS sendiri memang harapannya perempuan bisa tembus karena jika semua laki-laki gak akan terfokus mereka mendengarkan urusan-urusan perempuan. Harapannya di PKS semua perempuan itu lewat masalahnya masyarakat tidak semuanya bisa menerima. Kendala pribadi untuk saya yaitu masalah keuangan. Keunikan dari partai kami dari kader bukan ditunjuk tapi ditugaskan kalau disuruh maju ya maju beda dengan non kader. Dari perdapil bisa terdapat satu atau dua bacaleg non kader dan hal itu tidak masalah selama mau mengikuti aturan partai. Ada beberapa orang luar yang ingin berkontribusi di parlemen tapi mereka tidak punya wadahnya sehingga mereka melihat mana partai yang sesuai dengan mereka, ada yang mereka datang dan ada yang kita datang dan partai juga melihat bahwa beliau ini berpotensi dan mengerti keadaan situasi politik. Tingkat keberhasilan partai dalam mentraining kader-kader perempuan bisa dibilang berhasil karena semua kader perempuan itu terberdayakan

artinya berkontribusi di masyarakat baik itu di posyandu, majelis taklimnya dan juga seperti PKK dan setiap pekannya itu kita punya kegiatan rutin dan dibekali tentang keilmuan dan semuanya insya Allah terberdayakan. Kalau untuk data kader di PKS bisa dibilang lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki" (Yesi Budaya Sari, Wawancara, 30 September 2020).

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa penjelasan dari setiap informan saling berkesinambungan terlihat bahwa memang pada dasarnya PKS memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin bergabung dengan partai tetapi akan dilihat kembali dari personal individu dan kemampuan yang dia miliki tidak bedanya juga dengan kader partai sendiri terlebih untuk perempuan, dimana ketika telah ditugaskan kader harus siap dan jika tidak bisa pun harus mempunyai alasan yang jelas sehingga partai bisa menerima alasan tersebut, partai juga telah mampu menghadirkan kader perempuan melebihi 50% dari keseluruhan kader dan hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan PKS dalam merekrut kader perempuan tidak ada hanya ketika pencalonan saja, Tetapi bisa melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa masih adanya rasa solidaritas partai terhadap sesama kader selagi kader tersebut memang layak dan patut untuk menjadi seorang caleg dan juga masih adanya tumpang tindih pemahaman yang sistem patriarki masih belum hilang melihat bahwa peran perempuan tidak begitu penting bagi sekelompok orang yang mana tanpa sadar mereka tidak mengetahui bahwa adanya perempuan sangatlah berpengaruh nantinya terhadap tiap keputusan yang diambil di dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan konsep *affirmative action* yang dikemukakan oleh Dahlerup bahwa ada beberapa alasan mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting. Salah satunya adalah *the interert group argument* yang mana perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan, dan *the experience argument* yang mana perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun sosial) yang harus terwakili. Sama halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa pentingnya perempuan dalam partai politik memang sangat dibutuhkan untuk mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat yang sensitif gender.

Dari penjelasan beberapa informan dari kedua partai diatas, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa hal yang menjelaskan tentang pola rekrutmen dari PKS dan PNA sendiri yaitu:

Tabel 2 Pola Rekrutmen PKS

No.	Terbuka	Tertutup
1.	Dibukanya peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi caleg dari kedua partai.	Adanya penunjukan kader untuk menjadi caleg dari partai.
2.	Keaktifan calon yang mengajukan diri dalam memenuhi persyaratan.	Partai menjumpai calon dari luar kader untuk bisa bergabung dengan partai.
3.	Adanya agenda rapat yang diumumkan bagi kader yang ingin menjadi caleg.	Adanya kader yang menjumpai partai sendiri maupun melalui orang lain untuk mengisyaratkan bahwa dia ingin bergabung bersama partai dan bakal caleg dari partai.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan rekrutmen politik menurut UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga Negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut. Seperti penjelasan dari hasil wawancara dengan Eka Januar yang mengatakan:

“indikator sekarang siapa yang punya uang itu yang dicalonkan, karena politik kita berbiaya tinggi, orang yang tidak punya banyak uang maka dia akan tersisih dengan sendirinya. Banyak pemilih kita itu sebagai pemilih emosional dibandingkan rasional. Kalau pemilih rasional dia tidak liat uang, pemilih emosional dia melihat uang, kedekatan pribadi” (Eka Januar, Wawancara, 28 September 2020).

Tujuan utama dalam perekrutan perempuan yaitu memperbanyak jumlah kader, keterwakilannya, dan orientasi pada kekuasaan semakin banyak porsi semakin banyak pengaruhnya. Kendala yang paling besar dalam proses perekrutan perempuan ialah masih adanya sikap Apatis. Karena masih banyak perempuan yang masih hanya ingin ikut saja, paling kuat jika dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan paling dibidang kewanitaan karena masih kurangnya minat dan memosisikan diri dan walaupun telah diberi ruang, terlihat sulit memenuhi kuota keterwakilan perempuan itu untuk memenuhi kuota bakal caleg dan hanya beberapa saja yang mau.

Seperti yang disampaikan oleh Bardan Sahidi yang mengatakan bahwa:

“Indikator yang dilihat yang pertama itu kader yang punya ketertarikan yang ingin memahami, mampu berjuang bersama partai. Maksudnya orang yang mampu berjuang bersama partai itu orientasinya pertama dari pemahaman, tidak mungkin seseorang bisa bertahan lama di dalam partai jika dia tidak mengetahui tujuannya dan partai itu sendiri untuk apa” (Bardan Sahidi, Wawancara, 22 September 2020).

Hal diatas menunjukkan bahwa tidak ada pemaksaan dari pihak partai terhadap bacaleg yang diinginkan untuk bergabung bersama partai. Loyalitas dari kader terhadap partai menjadi nilai tambah dan pengetahuan seputar kepartaian juga menjadi tolak ukur dari partai dalam melihat pengetahuan dari sang calon ke depan. Sehingga kelojalitasannya betul-betul terjaga dengan baik dan dapat membangun partai agar menjadi semakin baik ke depan.

Tabel 3 Indikator Berdasarkan Teori Rekrutmen Politik Model Barber

No.	Motivasi	Sumber	Kesempatan
1.	Adanya ketertarikan	Biaya yang dikeluarkan	Pemilih emosional
2.	Elektabilitas	Latar belakang tokoh	Kedekatan pribadi

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Tabel 4 Pola Rekrutmen yang Dilakukan Oleh PKS

No	Aspek	PKS
1	Sumber Bacaleg	Mengutamakan merekrut bacaleg kader, namun juga memberikan peluang untuk non kader.
2	Jenjang kaderisasi	Partai memberikan pelatihan dan mengadakan kegiatan sosial lainnya per bulannya secara teratur

3	Posisi caleg perempuan	PKS memprioritaskan caleg perempuan agar mendapatkan nomor urut 1, dan memenuhi kuota 30%
---	------------------------	---

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Tabel perbedaan tersebut menunjukkan bahwa PKS hanya merekrut bacaleg yang sejak dini terus mendukung kemenangan pemilu PKS dan aktif dalam partai. Walaupun demikian PKS juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin bergabung dengan partainya dalam pesta demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. perekrutan bacaleg dari PKS membuka jalur luar karena ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan yang baru mengetahui dan ingin ikut bergabung dengan PKS, sehingga PKS sendiri membuka peluang bagi yang ingin mendaftar dan melihat track recordnya sebagai caleg dan disamakan dengan caleg dari kader, karena sistem pemilu yang digunakan terbuka tidak ada istilah hanya kader yang akan terpilih dan menjadi pemenang dalam pemilu karena masyarakat yang akan memilih ketika sudah dimasukkan ke dalam daftar caleg. Dengan demikian jelas bahwa PKS memberikan kesempatan kepada setiap elemen masyarakat yang mampu dan ingin bergabung dalam perekrutan legislatif 2019 lalu.

E. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pola rekrutmen yang dilakukan PKS dalam memenuhi kuota 30% perempuan pada pemilu tahun 2019, kedua partai menggunakan pola rekrutmen tertutup dan terbuka, dimana PKS lebih cenderung unggul dalam mempersiapkan kader perempuan. Indikator yang digunakan PKS dalam menentukan bakal calon legislatif perempuan yang diusung pada pemilu tahun 2019

di Kota Banda Aceh adalah lebih cenderung melihat seseorang yang loyal dan mampu bersama-sama dengan partai untuk saling berjuang dan mengetahui tujuan dari kepartaian itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS menggunakan pola rekrutmen calon dengan sistem terbuka dan tertutup model Barber dan selalu memperhatikan sumber motivasi dan peluang masing-masing calon

Daftar Pustaka

- Affiah, Neng, Dara. 2017. *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Edisi Revisi. Yogyakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Endah, Prabasini. 2010. *Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat*. Daerah kota Surakarta
- Erwan Agus purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. GAVA MEDIA
- Hesti arniwulan, Dian Noeswantari. 2005. *Menggugat hak politik perempuan*. Konsorsium suara perempuan (KSP) DAN the ford foundation Jakarta
- J.R. Raco. 2006. *Metode penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Mustafa lutfi, M. Irwan satriawan. 2016. *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di indonesia*. UB press
- Priyatmoko, dkk. 1992. *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*. Lembaga Peneleitian Unair.
- Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT Penerbit IPB Press
- Ratna Megawangi. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan
- Silalahi, 2012. *Metode penelitian sosial*. Refika Aditama
- Soetomo. 2007. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.